





















































































Dalam logika aliran Feminisme marxis, penindasan terhadap perempuan hampir tidak ada sangkut pautnya dengan kaum laki-laki maupun budaya patriarki. Penindasan perempuan menurut mereka berakar dari sistem eksploitasi yang bersifat kultural. Sebab demikian mereka menunjuk sistem kapitalisme sebagai akar permasalahan penindasan ini. Maka untuk menjawab persoalan ketertindasan dan keterbelakangan perempuan, kalangan feminis Marxis menawarkan perlawanan terhadap struktur kelas (hierarki), sebab menurut mereka hanya dengan jalan merubah struktur kelas --yakni dengan cara revolusi, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan pada gilirannya tidak lagi diwarnai oleh hierarki penindasan.

Baik aliran Feminisme Radikal maupun Feminisme Marxis, keduanya sama-sama mengambil peran yang timpang dalam melihat persoalan ketertindasan ini. Feminisme Radikal terlalu berkonsentrasi pada ideologi Maskulinitas, dengan sendirinya gerakan mereka mereduksi existensi sistem sosial yang erat kaitannya dengan struktur penindasan. Begitu pula sebaliknya, Feminisme Marxis yang meletakkan dasar perlawanan terhadap struktur kelas, juga mereduksi Feminitas yang dalam beberapa hal juga tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hierarki ketertindasan. Karena berbagai kekurangan tersebut, lahirlah aliran ketiga dalam feminisme: Feminisme Sosialis. Kelahirannya lebih bersifat mutualisme, mengambil peran penengah dari berbagai























Dengan tidak menutup mata bahwa kebijakan Wardiman memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penting: persaingan global, dan realitas perekonomian masyarakat Indonesia yang tingkat kesejahteraannya mendesak untuk dijawab, tetapi memaksakan pendidikan menempati fungsi "reproduksi" demi menjamin target-target kapital bukanlah solusi yang tanpa resiko. Paling tidak kebijakan tersebut mereduksi esensi dari tujuan pendidikan itu sendiri. Melalui proses pembelajaran yang konsisten sejak di level Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi, peserta didik telah terbiasa digiring pada pola dan struktur berpikir pragmatis: antara siap pakai dan tidak. Target keberhasilan pendidikan akhirnya hanya ditentukan oleh dua pilihan pragmatisme di atas.

Praktek pendidikan kemudian cenderung bersifat ideologis. Atau paling tidak, pendidikan menjadi bagian dari sistem ideologi yang dikehendaki oleh negara. Pendidikan yang mulanya diniatkan menghargai akal sehat, dalam kenyataan terlalu dibebani oleh pesan-pesan ideologis yang seringkali bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Hal demikian tercermin dalam sistem kurikulum yang tidak lagi memuat berbagai disiplin keilmuan secara obyektif. Kurikulum dipolitisir sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik bukanlah pengetahuan yang obyektif, tetapi pengetahuan yang sarat dengan dominasi dan hegemoni budaya.









ujungnya adalah eksploitasi sumber daya (lingkungan dan manusia).

Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi demikian. Pertama, teori pembangunan yang diproduksi dan disebarakan oleh Barat adalah diskursus yang sarat dengan ideologi, di samping mengandung kepentingan untuk menguasai kebijakan politik negara Dunia Ketiga. Kedua, Bantuan pembangunan sebagai manifestasi dari proyek developmentalisme sering dikembangkan dalam rangka mempertahankan status quo. Artinya, investasi dan bantuan pembangunan memang sengaja dimaksudkan untuk mengikat negara Dunia Ketiga pada kemauan ekonomi negara maju. Ketiga, ideologi dan teori pembangunanisme sebenarnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengangkat negara Dunia Ketiga dari lilitan kemiskinan dan keterbelakangan, namun hanya merupakan media transfer pengalaman negara-negara maju untuk diadaptasi di negara terbelakang.

Setelah setengah abad teori dan ideologi ini diadaptasi dan dikembangkan di berbagai negara Dunia Ketiga, hampir tidak ada yang berubah: kecuali dominasi Amerika Serikat semakin besar bagi negara Dunia Ketiga, dan hancurnya sistem ekonomi dan politik moneter. Indonesia adalah contoh yang paling representatif atas gagalnya proyek ini.

Padahal, selama 35 tahun mengadaptasi teori tersebut, Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang paling serius menjamin berlangsungnya gagasan ini. Negara melalui



menanam modal di negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga kemudian terjebak dalam siklus lilitan hutang, sebab sistem ekonomi moneter juga ternyata sangat rapuh dalam percaturan persaingan ekonomi global. Celakanya, roda ekonomi negara Dunia Ketiga --seperti halnya Indonesia, lebih banyak dikembangkan dalam kerangka monopoli: antara elit kekuasaan dan pengusaha. Praktis yang menguasai akses terhadap basis ekonomi adalah segelintir orang dari elit kekuasaan dan pengusaha. Sementara kebanyakan masyarakat --karena berbagai keterbatasan akses terhadap basis ekonomi, tidak juga beranjak dari lilitan kemiskinan. Demikianlah, di Indonesia hierarki penindasan yang berlapis itu, seakan menjadi siklus yang mewarnai dinamika sosio-ekonomi di sepanjang kekuasaan rezim Orde baru. Penindasan negara-negara maju terhadap negara berkembang yang direpresentasi oleh elit penguasa dan pengusaha, ternyata lebih meruncing ke bawah (*top-down*) berubah menjadi penindasan oleh elit penguasa terhadap masyarakat kelas pekerja.

Sebab demikian, dalam pandangan para analitis, lahirnya konsep pendidikan komformisme-developmental (Link and Match) sebenarnya tidak sekedar penjabaran teori pembangunanisme yang dianut oleh negara, tetapi lebih merupakan sebuah usaha pra-kondisi untuk merubah cara pikir masyarakat dalam memaknai ketimpangan dan ketidak-adilan struktural, di samping itu konsep tersebut juga mengandung muatan politis untuk menciptakan kesadaran "kelas pekerja"



























